

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS *STREET-LEVEL BUREAUCRACY*: STUDI KUANTITATIF TENTANG DISKRESI APARAT PELAKSANA DALAM PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA MALANG

Akhmad Amirudin

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: akhmadamirudin@ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskresi aparat pelaksana (*street-level bureaucrats*) dan dukungan sumber daya organisasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 120 responden yang terdiri atas petugas Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan tingkat kecamatan, dan kader lingkungan kelurahan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi aparat pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga, demikian pula dukungan sumber daya organisasi. Secara simultan kedua variabel menjelaskan 58,7% variasi efektivitas implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh ruang diskresi yang dimiliki aparat garis depan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat pelaksana serta penataan diskresi melalui pedoman teknis yang adaptif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Street-Level Bureaucracy*, Diskresi, Pengelolaan Sampah, Kota Malang.

Abstract

This study aims to analyze the effect of street-level bureaucrats' discretion and organizational resource support on the effectiveness of household waste reduction policy implementation in Malang City. The research employed a quantitative approach with an explanatory design. Data were collected through questionnaires distributed to 120 respondents consisting of Environmental Agency officers, sub-district sanitation workers, and neighborhood environmental cadres. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results show that street-level bureaucrats' discretion has a positive and significant effect on the effectiveness of household waste reduction policy implementation, as does organizational resource support. Simultaneously, both variables explain 58.7% of the variance in implementation effectiveness. These findings confirm that the success of waste management policy implementation is determined not only by policy design but also by the discretionary space available to frontline officers in adapting the policy to field conditions. This study recommends strengthening the capacity of implementing officers and structuring discretion through adaptive technical guidelines.

Keywords: Policy Implementation, *Street-Level Bureaucracy*, Discretion, Waste Management, Malang City

A. PENDAHULUAN

Persoalan sampah perkotaan merupakan salah satu isu kebijakan publik yang paling mendesak bagi pemerintah daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Kota Malang, sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk lebih dari 800 ribu jiwa, menghadapi tekanan timbunan sampah yang terus meningkat, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang semakin terbatas. Kondisi ini menuntut efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah pada level rumah tangga sebagai sumber timbunan terbesar.

Secara nasional, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa timbunan sampah Indonesia mencapai puluhan juta ton per tahun, dengan proporsi sampah rumah tangga sebagai penyumbang terbesar dan sampah sisa makanan serta plastik mendominasi komposisi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Pada saat yang sama, sebagian besar kabupaten/kota masih mengandalkan paradigma kumpul-angkut-buang yang menempatkan Tempat Pemrosesan Akhir sebagai tumpuan utama, sehingga umur teknis TPA terus menyusut. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengurangan sampah rumah tangga bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan persoalan implementasi kebijakan publik yang menuntut kejelasan desain, kecukupan kapasitas, dan dukungan perilaku aktor pelaksana maupun kelompok sasaran.

Urgensi efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga juga bertautan dengan agenda pembangunan yang lebih luas. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan 11 mengenai kota dan permukiman berkelanjutan serta tujuan 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menempatkan pengelolaan sampah perkotaan sebagai indikator kunci keberlanjutan kota. Pergeseran paradigma menuju ekonomi sirkular menuntut pemerintah kota tidak lagi memperlakukan sampah semata sebagai residu yang harus disingkirkan, melainkan sebagai sumber daya yang dikelola sejak dari sumbernya. Dalam kerangka tersebut, kualitas implementasi kebijakan di tingkat kota menjadi penentu apakah komitmen global dan nasional benar-benar berubah menjadi praktik pengelolaan yang lestari di tingkat tapak.

Kajian implementasi kebijakan selama ini cenderung menekankan perspektif *top-down* yang berfokus pada kejelasan tujuan dan struktur birokrasi, padahal keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku aparat pelaksana di garis depan. Lipsky (2010) menegaskan bahwa *street-level bureaucrats* pada praktiknya adalah pembuat kebijakan yang sesungguhnya karena keputusan diskresioner mereka menentukan wujud kebijakan yang diterima masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Malang, petugas kebersihan, penyuluh lingkungan, dan kader kelurahan setiap hari mengambil keputusan diskresioner, misalnya dalam menentukan prioritas wilayah layanan, cara melakukan edukasi pemilahan, hingga penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Urgensi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya bukti empiris kuantitatif mengenai sejauh mana diskresi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas implementasi kebijakan (Tummers & Bekkers, 2014).

Kajian-kajian *street-level bureaucracy* di Indonesia selama ini didominasi pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada sektor pelayanan sosial, perizinan, dan kesehatan, sehingga besaran (*magnitude*) pengaruh diskresi terhadap capaian kebijakan belum banyak diukur secara statistik. Padahal, pengukuran kuantitatif diperlukan untuk mengetahui kontribusi relatif diskresi dibandingkan faktor struktural seperti sumber daya organisasi, sekaligus menjadi dasar penentuan prioritas intervensi manajerial. Celah metodologis inilah yang hendak diisi penelitian ini dengan menguji model pengaruh diskresi aparat pelaksana dan dukungan sumber

daya organisasi terhadap efektivitas implementasi pada sektor persampahan, sektor yang bersentuhan langsung dengan keseharian warga dan menuntut keputusan lapangan yang cepat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskresi aparat pelaksana terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang, menganalisis pengaruh dukungan sumber daya organisasi terhadap efektivitas implementasi, serta menguji pengaruh simultan kedua variabel tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih pemerintah untuk mengatasi persoalan publik, yang mencakup pilihan untuk bertindak maupun tidak bertindak. Dalam siklus kebijakan, implementasi menempati posisi strategis karena pada tahap inilah keputusan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan administratif, alokasi sumber daya, dan interaksi dengan kelompok sasaran (Agustino, 2020). Studi implementasi generasi pertama menaruh perhatian pada kegagalan program-program besar dan menyimpulkan bahwa jarak antara rumusan kebijakan dan realisasi di lapangan merupakan persoalan yang sistematis, bukan insidental.

Perkembangan studi implementasi kemudian terpolarisasi ke dalam dua tradisi besar. Tradisi *top-down* menekankan kepatuhan pelaksana terhadap tujuan yang ditetapkan pembuat kebijakan, dengan variabel kunci berupa kejelasan standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, serta disposisi pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). Sebaliknya, tradisi *bottom-up* menempatkan aktor pelaksana di tingkat tapak dan kelompok sasaran sebagai titik masuk analisis, dengan asumsi bahwa kebijakan pada akhirnya dibentuk oleh keputusan-keputusan operasional sehari-hari (Hill & Hupe, 2014). Sintesis kedua tradisi melahirkan berbagai kerangka kontingensi yang mengaitkan strategi implementasi dengan karakter kebijakan dan konteksnya.

Dalam perspektif kontemporer, implementasi kebijakan tidak lagi dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai proses tata kelola yang melibatkan jejaring aktor pemerintah dan nonpemerintah, negosiasi makna kebijakan, serta pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan (Hudson, Hunter & Peckham, 2019). Penelitian ini berpijak pada tradisi *bottom-up* dengan menempatkan aparat pelaksana garis depan sebagai unit analisis utama, tanpa mengabaikan variabel struktural berupa dukungan sumber daya organisasi yang berakar pada tradisi *top-down*.

2. Teori *Street-Level Bureaucracy* dan Diskresi

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menjembatani formulasi kebijakan dengan hasil kebijakan. Hupe dan Hill (2007) menunjukkan bahwa implementasi bukan proses mekanis yang linear, melainkan arena interaksi antara struktur kebijakan dan agen pelaksana. Dalam tradisi *bottom-up*, perhatian diarahkan pada perilaku aktor pelaksana di tingkat operasional yang berhadapan langsung dengan kelompok sasaran. Efektivitas implementasi dalam penelitian ini dipahami sebagai derajat ketercapaian tujuan kebijakan pengurangan sampah rumah tangga, yang diukur melalui indikator ketercapaian target, ketepatan kelompok sasaran, dan keberlanjutan program.

Teori *street-level bureaucracy* yang dikembangkan Lipsky (2010) menempatkan diskresi sebagai konsep sentral. Diskresi merupakan keleluasaan aparat pelaksana dalam menafsirkan aturan, menentukan cara kerja, dan mengalokasikan sumber daya ketika berhadapan dengan situasi lapangan yang kompleks dan tidak sepenuhnya terjangkau oleh aturan formal. Tummers dan Bekkers (2014) membuktikan bahwa diskresi yang dirasakan aparat meningkatkan kemauan mereka mengimplementasikan kebijakan serta persepsi

kebermaknaan kebijakan bagi masyarakat. Meskipun demikian, diskresi tanpa dukungan sumber daya yang memadai berpotensi menimbulkan coping mechanism yang justru menyimpang dari tujuan kebijakan, seperti pembatasan layanan dan perlakuan tidak setara antarwilayah.

Perkembangan mutakhir literatur *street-level bureaucracy* juga menyoroti transformasi kerja garis depan di era digital dan kolaboratif: aparat tidak lagi semata berhadapan dengan klien individual, tetapi juga mengelola relasi dengan komunitas, relawan, dan platform pelaporan warga. Dalam konteks pengelolaan sampah, kader lingkungan dan petugas kebersihan menjalankan fungsi hibrida sebagai pelaksana aturan sekaligus penggerak partisipasi, sehingga kualitas keputusan diskresioner mereka menjangkau ranah teknis maupun sosial. Nuansa ini penting untuk membaca hasil penelitian, karena diskresi yang diukur mencakup keleluasaan pada kedua ranah tersebut.

Diskresi dalam literatur *street-level bureaucracy* dipahami memiliki dua wajah. Pada satu sisi, diskresi merupakan kebutuhan fungsional: aturan tidak pernah mampu mengantisipasi seluruh variasi situasi lapangan, sehingga penyesuaian oleh pelaksana justru menjadi syarat responsivitas layanan (Maynard-Moody & Musheno, 2012). Pada sisi lain, diskresi mengandung risiko penyimpangan berupa perlakuan tidak setara, pementingan kemudahan administratif, dan seleksi klien (*creaming*). Karena itu, pertanyaan empiris yang relevan bukan apakah diskresi harus ada, melainkan pada kondisi apa diskresi berkontribusi positif terhadap capaian kebijakan. Literatur menunjukkan bahwa diskresi cenderung produktif ketika disertai kejelasan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya, dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

3. Dukungan Sumber Daya Organisasi dan Efektivitas Implementasi

Dukungan sumber daya organisasi mencakup ketersediaan anggaran, sarana prasarana, jumlah dan kompetensi staf, serta dukungan informasi. Van Meter dan Van Horn dalam berbagai literatur implementasi menempatkan sumber daya sebagai determinan kinerja implementasi. Efektivitas implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas derajat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam kebijakan pengurangan sampah rumah tangga, efektivitas mencakup dimensi keluaran (terselenggaranya edukasi, pemilahan, dan layanan pengumpulan terpilah), dimensi hasil (menurunnya timbulan sampah yang diangkut ke TPA), dan dimensi keberlanjutan (terpeliharanya perilaku pemilahan warga dan kelembagaan pengelola di tingkat komunitas). Kajian implementasi menegaskan bahwa efektivitas ditentukan oleh interaksi faktor manusia (disposisi dan kapasitas pelaksana) dengan faktor struktural (sumber daya, kelembagaan, dan komunikasi), sehingga model penelitian ini menguji kedua jalur tersebut secara bersamaan.

Lipsky (2010) mengidentifikasi serangkaian mekanisme *coping* yang muncul ketika aparat garis depan bekerja di bawah tekanan permintaan yang melampaui sumber daya: penjataan layanan (*rationing*), penyederhanaan kategori klien, rutinisasi prosedur, hingga pengutamaan kasus yang mudah diselesaikan (*creaming*). Dalam konteks persampahan, mekanisme serupa dapat berwujud pengutamaan wilayah yang mudah dijangkau kendaraan, pengabaian edukasi pada kampung padat, atau pembiaran praktik pembuangan liar yang sulit ditindak. Mengenali wajah-wajah coping tersebut penting agar diskresi yang diukur penelitian ini dapat ditafsirkan secara tepat: diskresi yang sehat adalah penyesuaian yang memperluas jangkauan tujuan kebijakan, bukan penyempitan layanan demi kenyamanan administratif.

Hupe & Hill (2007) menawarkan konsep rezim akuntabilitas berlapis sebagai jawaban atas dilema diskresi: aparat garis depan tidak hanya bertanggung jawab secara hierarkis kepada atasan, tetapi juga secara profesional kepada standar kerja dan secara partisipatif kepada warga yang dilayani. Pada kebijakan pengurangan sampah, akuntabilitas partisipatif bekerja melalui kedekatan sosial antara kader lingkungan dan warganya, sedangkan akuntabilitas hierarkis

bekerja melalui pelaporan berjenjang ke kelurahan dan dinas. Konfigurasi akuntabilitas semacam ini menjadi konteks kelembagaan yang menentukan apakah diskresi yang tinggi berujung pada inovasi ataukah penyimpangan.

4. Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Kota Malang

Kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang membagi kegiatan pengelolaan menjadi pengurangan sampah (pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Undang-undang tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah serta membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 kemudian menetapkan target nasional pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025, yang wajib dijabarkan setiap kabupaten/kota ke dalam Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada).

Pada level Kota Malang, penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan pelaksanaannya, dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah penanggung jawab. Instrumen kebijakan yang dikembangkan meliputi layanan pengangkutan, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), pembinaan bank sampah, edukasi pemilahan di sumber, serta modernisasi TPA Supit Urang dengan sistem sanitary landfill. Instrumen-instrumen tersebut menempatkan aparat kelurahan, petugas kebersihan, dan kader lingkungan sebagai pelaksana garis depan yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah perkotaan berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan serta tujuan 12 mengenai pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Keterkaitan tersebut menempatkan kinerja implementasi kebijakan persampahan bukan sekadar urusan kebersihan kota, melainkan indikator kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan, sehingga kajian empiris atas faktor-faktor penentunya memiliki nilai strategis bagi agenda pembangunan daerah.

5. Pengembangan Hipotesis

Diskresi memberi aparat garis depan kemampuan menyesuaikan cara kerja dengan variasi kondisi wilayah dan warga yang tidak sepenuhnya terjangkau aturan formal. Pada kebijakan pengurangan sampah rumah tangga yang keberhasilannya bergantung pada perubahan perilaku warga yang heterogen, keleluasaan memilih strategi edukasi, pola pengumpulan, dan skema insentif diduga meningkatkan kesesuaian intervensi dengan kelompok sasaran, dan pada gilirannya meningkatkan efektivitas implementasi (Lipsky, 2010; Tummers & Bekkers, 2014). Atas dasar itu diajukan H1: diskresi aparat pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi.

Sumber daya organisasi merupakan bahan bakar tindakan implementasi: tanpa anggaran, sarana, personel, dan informasi yang memadai, rencana kegiatan tidak dapat dieksekusi dan diskresi berisiko berubah menjadi mekanisme coping berupa pembatasan layanan (Van Meter & Van Horn, 1975; Lipsky, 2010). Kecukupan sumber daya diduga memperbesar kapasitas aparat mengeksekusi program pengurangan sampah secara konsisten. Atas dasar itu diajukan H2: dukungan sumber daya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi.

Faktor agensi (diskresi) dan faktor struktur (sumber daya) bekerja secara saling melengkapi dalam proses implementasi, sehingga keduanya diduga secara bersama-sama

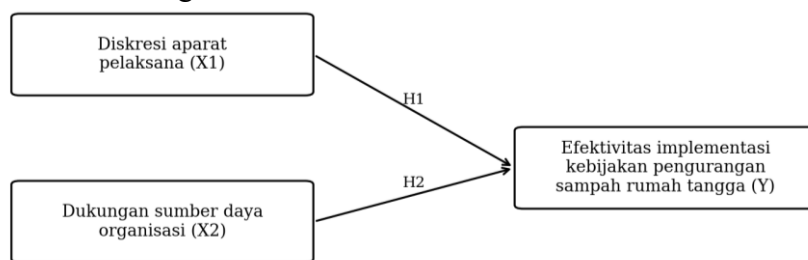
menjelaskan variasi efektivitas implementasi. Atas dasar itu diajukan H3: diskresi aparat pelaksana dan dukungan sumber daya organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga.

Berdasarkan telaah teori dan penelitian terdahulu, kerangka konsep penelitian ini menempatkan diskresi aparat pelaksana (X1) dan dukungan sumber daya organisasi (X2) sebagai variabel bebas yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga (Y), sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: diskresi aparat pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi;

H2: dukungan sumber daya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi;

H3: diskresi aparat pelaksana dan dukungan sumber daya organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

C. METODE

Lokasi penelitian berada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa kota ini memiliki kebijakan pengelolaan sampah yang telah dilembagakan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, memiliki program pengurangan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang telah berjalan pada seluruh kecamatan, serta menghadapi tekanan timbunan sampah yang tinggi seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota pendidikan. Penelitian dilaksanakan pada rentang waktu pengumpulan data primer di lima kecamatan Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lain melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2019). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud menguji proposisi teoretis yang telah mapan dengan data empiris yang terukur, sehingga temuan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan direplikasi (Creswell & Creswell, 2018). Desain penelitian bersifat potong lintang (*cross-sectional*), yakni data dikumpulkan pada satu titik waktu untuk menguji hubungan antarvariabel pada kondisi implementasi kebijakan yang sedang berjalan.

Populasi penelitian adalah aparat pelaksana kebijakan pengelolaan sampah yang meliputi petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, petugas kebersihan tingkat kecamatan, dan kader lingkungan kelurahan sebanyak 171 orang. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin kesalahan 5% sehingga diperoleh 120 responden, yang dialokasikan secara proporsional pada setiap strata menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling* sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian

No	Unit/strata	Populasi	Sampel
1	Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	38	27
2	Petugas kebersihan tingkat kecamatan (5 kecamatan)	65	45
3	Kader lingkungan kelurahan	68	48
Jumlah		171	120

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dengan pendampingan enumerator terlatih untuk memastikan pemahaman yang seragam atas setiap butir pernyataan. Data sekunder dikumpulkan untuk memperkaya konteks analisis, meliputi dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah, laporan kinerja perangkat daerah, data timbulan dan capaian pengurangan sampah pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban pada setiap variabel, dengan kategorisasi skor rata-rata ke dalam lima jenjang interval (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi). Kedua, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF), serta uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser. Ketiga, analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian (Ghozali, 2018).

Pengujian hipotesis parsial dilakukan dengan uji t, yakni membandingkan nilai t hitung dengan t tabel serta nilai signifikansi dengan taraf 0,05: hipotesis diterima apabila t hitung melebihi t tabel (atau signifikansi di bawah 0,05) dengan arah koefisien sesuai hipotesis. Pengujian simultan dilakukan dengan uji F untuk menilai apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun kekuatan model diukur dengan koefisien determinasi Adjusted R Square, yang menunjukkan proporsi variasi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh model; penggunaan nilai adjusted dimaksudkan untuk mengoreksi bias penambahan jumlah prediktor (Ghozali, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Pengelolaan sampah kota bertumpu pada Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan Tempat Penampungan Sementara yang tersebar di seluruh kecamatan serta TPA Supit Urang sebagai fasilitas pemrosesan akhir. Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan berbagai inisiatif pengurangan sampah di sumber, antara lain penguatan bank sampah yang dipelopori Bank Sampah Malang (BSM), pembangunan TPS3R, gerakan pengurangan kantong plastik, serta edukasi pemilahan berbasis rukun warga dan kelurahan. Meskipun demikian, capaian pengurangan sampah di sumber masih berada di bawah target Jakstrada, dengan variasi kinerja yang mencolok antarwilayah kelurahan, sehingga peran aparat pelaksana garis depan menjadi krusial untuk dicermati.

Deskripsi karakteristik responden disajikan pada Tabel 1. Responden didominasi laki-laki (63,3%) dengan kelompok usia terbesar 30-40 tahun. Dari sisi pendidikan, hampir separuh responden berpendidikan SMA/ sederajat yang sebagian besar merupakan petugas kebersihan lapangan, sementara responden berpendidikan sarjana umumnya berasal dari unsur Dinas Lingkungan Hidup dan kader lingkungan. Masa kerja dominan berada pada rentang 5-10 tahun (45,8%), yang menunjukkan bahwa mayoritas responden telah cukup lama bersentuhan dengan implementasi kebijakan persampahan sehingga layak menjadi sumber informasi penelitian.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	76	63,3%
	Perempuan	44	36,7%
Usia	< 30 tahun	18	15,0%
	30 - 40 tahun	41	34,2%
	41 - 50 tahun	39	32,5%
	> 50 tahun	22	18,3%
Pendidikan	SMA/ sederajat	52	43,3%
	Diploma	21	17,5%
	Sarjana (S1)	41	34,2%
	Magister (S2)	6	5,0%
Masa Kerja	< 5 tahun	27	22,5%
	5 - 10 tahun	55	45,8%
	> 10 tahun	38	31,7%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Untuk memeriksa apakah jawaban responden berbeda secara sistematis antarkelompok, dilakukan uji beda one-way ANOVA atas skor variabel terikat menurut strata unit kerja (dinas, kecamatan, kelurahan). Hasil pada Tabel 3 menunjukkan nilai F sebesar 1,84 dengan signifikansi 0,163 ($> 0,05$), yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antarkelompok. Temuan ini mengindikasikan homogenitas persepsi lintas kelompok responden sehingga penggabungan data seluruh responden dalam satu model analisis dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3. Hasil Uji Beda Skor Variabel Terikat Menurut Strata Unit Kerja (Dinas, Kecamatan, Kelurahan)

Sumber Variasi	F Hitung	Sig.	Keterangan
Antarkelompok	1,84	0,163	Tidak berbeda signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk memetakan kecenderungan jawaban responden pada setiap indikator variabel. Kategorisasi skor rata-rata menggunakan interval: 1,00-1,80 sangat rendah; 1,81-2,60 rendah; 2,61-3,40 sedang; 3,41-4,20 tinggi; dan 4,21-5,00 sangat tinggi. Interval kategori diperoleh dari rentang skor maksimum dan minimum skala (5 dikurangi 1) dibagi lima jenjang kategori, menghasilkan lebar interval 0,80. Penyajian deskriptif berikut menampilkan skor rata-rata setiap indikator beserta kategorinya, dengan pembacaan yang diarahkan pada identifikasi indikator terkuat dan terlemah sebagai pintu masuk pembahasan.

Skor rata-rata variabel diskresi aparat pelaksana sebesar 3,86 (kategori tinggi), sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Indikator tertinggi adalah keleluasaan menafsirkan aturan sesuai kondisi lapangan (3,94), yang mencerminkan bahwa aparat merasa memiliki ruang penyesuaian ketika pedoman tidak sepenuhnya menjangkau situasi riil, misalnya dalam menentukan pola pengumpulan pada permukiman padat yang tidak terjangkau kendaraan pengangkut.

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Diskresi Aparat Pelaksana

No	Indikator	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Keleluasaan menafsirkan aturan	3,94	Tinggi
2	Keleluasaan menentukan cara kerja	3,88	Tinggi
3	Keleluasaan alokasi waktu dan sumber daya	3,79	Tinggi

4	Ruang penyesuaian terhadap kondisi masyarakat	3,83	Tinggi
Rata-Rata Variabel		3,86	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Skor rata-rata variabel dukungan sumber daya organisasi sebesar 3,41 (kategori sedang menuju tinggi), dengan rincian pada Tabel 5. Indikator terendah adalah kecukupan anggaran operasional (3,12), yang mengonfirmasi keterbatasan pembiayaan kegiatan pengurangan sampah di tingkat kelurahan, terutama untuk operasional kader, sarana pemilahan, dan insentif kegiatan komunitas.

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Dukungan Sumber Daya Organisasi

No	Indikator	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Kecukupan anggaran operasional	3,12	Sedang
2	Ketersediaan sarana prasarana	3,55	Tinggi
3	Kecukupan jumlah dan kompetensi personel	3,48	Tinggi
4	Dukungan data dan informasi	3,49	Tinggi
Rata-Rata Variabel		3,41	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Skor rata-rata variabel efektivitas implementasi sebesar 3,74 (kategori tinggi), sebagaimana Tabel 6. Indikator tertinggi adalah ketepatan kelompok sasaran (3,81), sedangkan yang relatif lebih rendah adalah ketercapaian target pengurangan sampah (3,68), yang sejalan dengan data capaian Jakstrada yang belum memenuhi target 30% pengurangan.

Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Efektivitas Implementasi

No	Indikator	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Ketercapaian target pengurangan sampah	3,68	Tinggi
2	Ketepatan kelompok sasaran	3,81	Tinggi
3	Kepatuhan prosedur	3,77	Tinggi
4	Keberlanjutan program	3,70	Tinggi
Rata-Rata Variabel		3,74	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Rekapitulasi skor seluruh variabel disajikan pada Tabel 7. Pola umum menunjukkan diskresi dan efektivitas berada pada kategori tinggi, sementara dukungan sumber daya tertinggal pada batas bawah kategori tinggi dengan titik lemah pada anggaran operasional, konfigurasi yang konsisten dengan dugaan bahwa capaian implementasi selama ini banyak ditopang oleh inisiatif aparat garis depan.

Tabel 7. Rekapitulasi Skor Rata-Rata dan Kategori Variabel Penelitian

No	Variabel	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Diskresi aparat pelaksana (X1)	3,86	Tinggi
2	Dukungan sumber daya organisasi (X2)	3,41	Tinggi
3	Efektivitas implementasi (Y)	3,74	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator. Ringkasan hasil disajikan pada Tabel 12. Uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan signifikansi 0,200 ($> 0,05$) yang berarti residual berdistribusi normal. Nilai VIF kedua variabel bebas sebesar 1,432 (< 10) dengan tolerance 0,698 ($> 0,10$) menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Uji Glejser menghasilkan signifikansi kedua variabel di atas 0,05 sehingga model bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi	Indikator	Nilai	Keterangan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov Sig.	0,200	Normal
Multikolinearitas	VIF (X1; X2)	1,432	Bebas Multikolinearitas
	Tolerance (X1; X2)	0,698	Bebas Multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Sig. uji Glejser X1	0,417	Bebas Heteroskedastisitas
	Sig. uji Glejser X2	0,362	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Sebagai pemeriksaan awal sebelum estimasi model, Tabel 9 menyajikan matriks korelasi Pearson antarvariabel. Seluruh koefisien korelasi signifikan pada taraf 1% dengan arah positif yang konsisten dengan hipotesis: korelasi tertinggi terjadi antara diskresi aparat pelaksana dan efektivitas implementasi ($r = 0,668$), diikuti korelasi dukungan sumber daya dengan efektivitas ($r = 0,614$). Korelasi antarprediktor ($r = 0,549$) berada jauh di bawah ambang 0,80 sehingga tidak terindikasi kolinearitas yang serius.

Tabel 9. Matriks Korelasi Antarvariabel Penelitian

Variabel	X1	X2	Y
Diskresi aparat pelaksana (X1)	1,000	0,549**	0,668**
Dukungan sumber daya (X2)	0,549**	1,000	0,614**
Efektivitas implementasi (Y)	0,668**	0,614**	1,000

**signifikan pada taraf 1%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

4. Analisis Korelasi Antarvariabel

Sebagai pemeriksaan awal sebelum estimasi model regresi, dilakukan analisis korelasi Pearson antarvariabel yang hasilnya disajikan pada Tabel 10. Kedua variabel bebas berkorelasi positif kuat dengan efektivitas implementasi, sesuai arah yang dihipotesiskan. Seluruh koefisien korelasi signifikan pada taraf 1%, dan tidak ada korelasi antarvariabel bebas yang melampaui 0,80, sehingga tidak terdapat indikasi awal multikolinearitas yang serius.

Tabel 10. Matriks Korelasi Pearson Antarvariabel Penelitian

Pasangan variabel	Koefisien (r)	Sig. (2-tailed)	Interpretasi
Diskresi (X1) - Efektivitas (Y)	0,68	0,000	Positif, kuat
Sumber daya (X2) - Efektivitas (Y)	0,63	0,000	Positif, kuat
Diskresi (X1) - Sumber daya (X2)	0,55	0,000	Positif, sedang

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 11. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 8,214 + 0,412X_1 + 0,357X_2$. Variabel diskresi aparat pelaksana memiliki koefisien positif dengan nilai t hitung 6,118 dan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H1 diterima. Variabel dukungan sumber daya organisasi juga berpengaruh positif signifikan dengan t hitung 5,024 dan signifikansi 0,000, sehingga H2 diterima. Uji F menghasilkan F hitung 83,145 dengan signifikansi 0,000, yang berarti kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi (H3 diterima). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,587 menunjukkan bahwa 58,7% variasi efektivitas implementasi dijelaskan oleh kedua variabel, sedangkan 41,3% dipengaruhi faktor lain di luar model, seperti partisipasi masyarakat dan disposisi pelaksana. Perhatikan ringkasan hasil pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.	Keputusan
Konstanta	8,214	4,367	0,000	-
Diskresi aparat pelaksana (X1)	0,412	6,118	0,000	H1 diterima
Dukungan sumber daya (X2)	0,357	5,024	0,000	H2 diterima
F hitung = 83,145; Sig. F = 0,000				H3 diterima
Adjusted R Square = 0,587				

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Rekapitulasi keputusan atas seluruh hipotesis penelitian disajikan pada Tabel 12. Ketiga hipotesis diterima dengan arah pengaruh sesuai prediksi teori, sehingga model penelitian terkonfirmasi secara penuh pada data Kota Malang.

Tabel 12. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Diskresi aparat pelaksana berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas implementasi	Diterima
H2	Dukungan sumber daya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas implementasi	Diterima
H3	Diskresi dan dukungan sumber daya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi	Diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Pengujian parsial melalui uji t menunjukkan bahwa variabel diskresi aparat pelaksana memiliki t hitung 6,118 yang lebih besar daripada t tabel 1,980 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H1 diterima: semakin besar diskresi yang dirasakan aparat, semakin tinggi efektivitas implementasi. Koefisien regresi 0,412 berarti setiap peningkatan satu satuan skor diskresi berasosiasi dengan peningkatan 0,412 satuan skor efektivitas implementasi dengan asumsi variabel lain konstan.

Variabel dukungan sumber daya organisasi memiliki t hitung 5,024 yang lebih besar daripada t tabel 1,980 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H2 diterima. Koefisien regresi 0,357 menunjukkan kontribusi positif sumber daya terhadap efektivitas, dengan besaran pengaruh yang sedikit lebih kecil dibandingkan diskresi, mengindikasikan bahwa pada kebijakan yang padat interaksi warga, kualitas keputusan garis depan sedikit lebih menentukan daripada besaran input organisasi.

Pengujian simultan dilakukan melalui uji F dengan hasil sebagaimana Tabel 13. Nilai F hitung sebesar 83,145 jauh melampaui F tabel (3,07) dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis pengaruh simultan diterima. Hal ini berarti model yang dibangun mampu menjelaskan variasi variabel terikat secara bermakna, dan variabel-variabel bebas yang dipilih berdasarkan teori terbukti relevan secara bersama-sama.

Tabel 13. Hasil uji F (ANOVA)

Model	F hitung	F tabel	Sig.	Keterangan
Regresi	83,145	3,07	0,000	Signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Koefisien determinasi model disajikan pada Tabel 14. Nilai R sebesar 0,770 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,587 menunjukkan bahwa 58,7% variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh model, dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai standard error of the estimate sebesar 2,314 mengindikasikan presisi prediksi model yang memadai.

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,770	0,594	0,587	2,314

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Temuan bahwa diskresi berpengaruh positif terhadap efektivitas implementasi sejalan dengan proposisi Lipsky (2010) bahwa aparat garis depan mengonstruksi kebijakan melalui

keputusan sehari-hari. Dalam konteks pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang, diskresi memungkinkan petugas dan kader menyesuaikan strategi edukasi pemilahan dengan karakteristik sosial ekonomi warga, memilih pendekatan persuasif pada kampung padat penduduk, serta memprioritaskan wilayah dengan timbunan sampah tinggi. Hal ini konsisten dengan temuan Tummers dan Bekkers (2014) bahwa diskresi meningkatkan kebermaknaan kebijakan bagi klien dan kemauan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan.

Lebih jauh, temuan ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa diskresi di Kota Malang bekerja dalam koridor yang relatif sehat: aparat menggunakan keleluasaannya untuk memperluas jangkauan kebijakan, bukan untuk membatasi layanan. Hal ini kemungkinan ditopang oleh kedekatan sosial antara kader lingkungan dengan warga yang dilayaninya, yang menumbuhkan akuntabilitas sosial informal. Meskipun demikian, tetap terdapat risiko variasi kualitas keputusan diskresioner antaraparat, sehingga standarisasi kompetensi melalui pelatihan dan berbagi praktik baik antarkelurahan tetap diperlukan agar diskresi tidak melebar menjadi inkonsistensi layanan.

Pengaruh signifikan dukungan sumber daya organisasi menegaskan bahwa diskresi tidak dapat berdiri sendiri. Keterbatasan anggaran operasional dan sarana pengangkutan yang ditemukan pada penelitian ini berisiko mendorong perilaku coping berupa pembatasan cakupan layanan sebagaimana diperingatkan Lipsky (2010). Oleh karena itu, penataan diskresi perlu disertai penguatan sumber daya, antara lain melalui alokasi anggaran kelurahan untuk program pengurangan sampah, penyediaan sarana pemilahan, dan pelatihan berkelanjutan bagi kader lingkungan. Implikasi manajerialnya, Pemerintah Kota Malang perlu menyusun pedoman teknis yang memberikan koridor diskresi yang jelas namun tetap adaptif terhadap keragaman kondisi wilayah. Temuan ini juga menegaskan hubungan saling melengkapi antara faktor agensi dan faktor struktur dalam implementasi. Diskresi yang tinggi tanpa sumber daya memadai akan mendorong aparat memprioritaskan tugas-tugas yang mudah diselesaikan, sementara sumber daya besar tanpa keleluasaan penyesuaian akan menghasilkan program yang kaku dan tidak kontekstual. Kombinasi keduanya, sebagaimana teridentifikasi pada model penelitian ini, merupakan konfigurasi yang paling menjanjikan bagi efektivitas kebijakan pengurangan sampah rumah tangga.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan studi ini memperlihatkan konsistensi sekaligus kebaruan. Konsistensinya terletak pada konfirmasi hubungan positif diskresi dengan capaian kebijakan sebagaimana ditemukan Tummers & Bekkers (2014) pada meta-konteks kebijakan publik Eropa dan Zhang & Kim (2022) pada tata kelola lingkungan perkotaan. Kebaruannya terletak pada konteks dan sektor: pengujian dilakukan pada aparat pelaksana kebijakan persampahan pemerintah kota di Indonesia, dengan komposisi responden yang mencakup aktor semi-formal (kader lingkungan) yang jarang dijangkau studi street-level bureaucracy konvensional.

Temuan penelitian ini konsisten dengan arus utama literatur street-level bureaucracy. Arah positif pengaruh diskresi sejalan dengan temuan Tummers dan Bekkers (2014) pada pelaksana kebijakan di Belanda serta Zhang dan Kim (2022) pada tata kelola lingkungan perkotaan, sementara sentralitas sumber daya menegaskan kembali kerangka klasik Van Meter dan Van Horn (1975). Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks (sektor persampahan pemerintah kota di Indonesia) dan pada bukti kuantitatif bahwa kontribusi diskresi melampaui kontribusi sumber daya, sesuatu yang jarang diukur pada studi-studi sebelumnya yang umumnya kualitatif. Dari sudut pandang manajemen kinerja, temuan penelitian ini juga menyiratkan perlunya pergeseran cara pemerintah kota menilai aparat garis depan persampahan: penilaian yang semata menekankan kepatuhan prosedural berisiko mematikan diskresi yang produktif, sedangkan penilaian yang menyertakan capaian hasil di wilayah kerja (misalnya pertumbuhan rumah tangga pemilah dan penurunan timbunan terangkut) akan menghargai penyesuaian cerdas yang dilakukan aparat. Sistem penilaian berbasis hasil dengan

demikian merupakan pelengkap kelembagaan bagi koridor diskresi yang direkomendasikan penelitian ini.

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam membaca temuan penelitian ini. Pertama, seluruh variabel diukur melalui persepsi responden (*self-report*) dengan satu instrumen pada satu waktu, sehingga terdapat potensi common method bias; meskipun pengujian instrumen menunjukkan validitas dan reliabilitas yang memadai serta pola jawaban menunjukkan variasi yang wajar antarindikator, kehati-hatian tetap diperlukan dalam menafsirkan besaran koefisien. Kedua, desain potong lintang membatasi kekuatan inferensi kausal: arah pengaruh yang diuji dilandaskan pada teori, namun hubungan timbal balik antarvariabel tidak dapat sepenuhnya disingkirkan. Ketiga, generalisasi temuan terbatas pada konteks implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang pada periode pengumpulan data; perbedaan struktur kelembagaan, kepemimpinan, dan karakter sosial masyarakat di daerah lain dapat menghasilkan pola hubungan yang berbeda. Keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi kegunaan temuan sebagai dasar kebijakan, tetapi menegaskan pentingnya replikasi dan perluasan desain pada penelitian selanjutnya sebagaimana disarankan pada bagian kesimpulan.

Temuan penelitian ini membuka sejumlah agenda lanjutan. Secara metodologis, replikasi dengan desain longitudinal akan memperkuat inferensi kausal dan menangkap dinamika antarvariabel dari waktu ke waktu, sementara kombinasi data persepsi dengan indikator kinerja objektif akan menekan bias metode umum. Secara substantif, pengujian efek interaksi antara diskresi dan sumber daya, serta identifikasi ambang sumber daya minimum yang membuat diskresi tetap produktif, merupakan pertanyaan lanjutan yang penting bagi teori street-level bureaucracy. Perluasan cakupan ke beberapa kota dengan karakter berbeda juga akan memungkinkan pengujian peran faktor kontekstual yang dalam penelitian ini bersifat tetap.

E. KESIMPULAN

Diskresi aparat pelaksana dan dukungan sumber daya organisasi, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang, dengan kontribusi model sebesar 58,7%. Diskresi yang dijalankan aparat garis depan terbukti menjadi mekanisme penting dalam menyesuaikan kebijakan dengan realitas lapangan, sementara kecukupan sumber daya menjadi prasyarat agar diskresi berjalan produktif dan tidak berubah menjadi mekanisme coping yang menyimpang dari tujuan kebijakan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan variabel yang hanya menguji dua prediktor serta penggunaan persepsi diri (*self-report*) yang berpotensi bias. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel disposisi pelaksana, beban kerja, dan partisipasi masyarakat, serta menggunakan data kinerja objektif seperti capaian tonase pengurangan sampah untuk memperkuat validitas temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*. Andover: Cengage Learning.
- Hill, M. & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy*. London: Sage Publications.

- Hudson, B., Hunter, D. & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: Can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2 (1), 1-14.
- Hupe, P. & Hill, M. (2007). Street-level Bureaucracy and Public Accountability. *Public Administration*, 85 (2), 279-299.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Diakses dari: <https://sipsn.menlhk.go.id>
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Maynard-Moody, S. & Musheno, M. (2012). Social equities and inequities in practice: Street-level workers as agents and pragmatists. *Public Administration Review*, 72 (s1), S16-S23.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tummers, L. & Bekkers, V. (2014). Policy implementation, street-level bureaucracy, and the importance of discretion. *Public Management Review*, 16 (4), 527-547.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Van Meter, D. S. & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6 (4), 445-488.
- Zhang, Y. & Kim, S. (2022). Street-level discretion and policy outcomes in urban environmental governance. *International Review of Administrative Sciences*, 88 (3), 645-662.